

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Realisasi inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 2,03% (yoy), meningkat dibandingkan inflasi triwulan II 2021 sebesar 1,89% (yoy). Tingkat inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan III 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi Nasional yang tercatat sebesar 1,6% (yoy), namun masih lebih rendah dari realisasi inflasi di wilayah Sumatera sebesar 2,08 % (yoy). Membaiknya daya beli masyarakat ditengah masih berlangsungnya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 dan berlanjutnya program vaksinasi mendorong peningkatan tekanan inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan III 2021. 2. Secara bulanan, tekanan inflasi tertinggi pada triwulan III 2021 terjadi pada bulan September 2021 sebesar 0,17% (mtm). Sementara itu, tekanan inflasi terendah pada triwulan III 2021 terjadi pada bulan Juli 2021 dengan capaian deflasi sebesar 0,12% (mtm). Secara umum pada triwulan III 2021, terjadi tren peningkatan tekanan inflasi secara bulanan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Juli 2021 Agustus 2021 September 2021 Inflasi Tahunan (% yoy) 2.00 1.94 2.03 Inflasi Bulanan (% mtm) -0.12 0.16 0.17 3. Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap tekanan inflasi pada triwulan III 2021 diantaranya biaya masuk Sekolah Menengah Atas, bahan bakar rumah tangga, bensin, rokok kretek filter, nasi dengan lauk, seng, daging ayam ras, tempe, dan mobil. Namun demikian, peningkatan laju inflasi masih tertahan akibat deflasi yang terjadi pada beberapa komoditas antara lain cabai merah, beras, emas perhiasan, udang basah, petai, bawang merah, air kemasan, tarif listrik dan angkutan udara. 4. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya, tekanan inflasi pada triwulan III 2021 tercatat lebih tinggi. Hal ini sejalan melandainya kasus penyebaran COVID-19 seiring adanya perbaikan sektor kesehatan dan berlanjutnya program vaksinasi sehingga mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Namun demikian tekanan inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan laporan masih berada di bawah rata-rata historis 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 2,19% (yoy). Sumber: BPS, diolah (berdasarkan tahun dasar 2018)

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, dapat kami sampaikan tantangan-tantangan pengendalian inflasi pada triwulan III 2021 sebagai berikut : 1. Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 varian Delta, yang dimulai sejak tanggal 6 Juli 2021. Kebijakan tersebut menyebabkan mobilitas masyarakat menurun sehingga mendorong penurunan level konsumsi masyarakat pada triwulan Laporan. 2. Kebijakan PPKM juga berpotensi menyebabkan gangguan distribusi pasokan pangan utamanya yang berasal dari Pulau Jawa. 3. Masuknya tahun ajaran baru sekolah dan dimulainya kembali proses pembelajaran tatap muka pada akhir Agustus 2021 serta adanya peningkatan kebutuhan sekolah dalam rangka memenuhi sarana prasarana sesuai protokol kesehatan di masa pandemi mendorong peningkatan biaya sekolah utamanya Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. 4. Peningkatan harga komoditas global (kedelai, CPO dan daging sapi impor asal Australia) yang dapat mempengaruhi peningkatan harga komoditas pangan domestik seperti tahu, tempe, minyak goreng dan daging sapi. 5. Peningkatan aktivitas konstruksi serta progress pelaksanaan investasi swasta mendorong peningkatan harga bahan bangunan seperti seng, besi beton dan baja ringan. 6. Peningkatan harga gas LPG 3 kg yang disebabkan kelangkaan pasokan gas LPG di pasaran.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada triwulan III 2021 TPID Provinsi Bengkulu mengadakan beberapa kegiatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Secara umum beberapa kegiatan pengendalian inflasi dilakukan dalam rangka memastikan stok dan distribusi serta pencegahan kenaikan harga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun detail kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Ketersediaan Pasokan a. Rapat koordinasi dalam rangka tindak lanjut rencana KAD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan - Bersama Biro Hukum dan Biro Kesra Setda Provinsi Bengkulu dalam rangka percepatan realisasi kerjasama antar daerah (KAD) dengan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Agustus 2021. - Rapat bersama BUMD potensial di wilayah Bengkulu terkait rencana KAD pada tanggal 14 September 2021. - Rapat Koordinasi dengan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menindaklanjuti realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21 September 2021. b. KPwBI Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Bantuan Teknis program digital farming UMKM Kelompok Tani Mandiri Mukti antara lain: - Bantek pelaksanaan pemasangan alat digital farming sensor tanah dan cuaca pada tanggal 12-13 Agustus 2021. - Bantek pelaksanaan monitoring lapangan terhadap proses budidaya pertanian bawang merah menggunakan teknologi digital farming sensor tanah dan cuaca pada tanggal 7-8 September 2021. c. TPID melalui Disperindag Provinsi Bengkulu dan Satgas Pangan melakukan pemantauan stok bahan pokok setiap hari kamis (di 2 pasar pantauan statistik) dan pemantauan stok distributor yang ada di Provinsi Bengkulu setiap bulan. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pangan lancar selama PPKM. d. Pelaksanaan Program Sikomandan (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan diantaranya: - Pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan laporan kelahiran dengan capaian hingga akhir September 2021 sbb: akseptor : 393 ekor (79,23 %), kebuntingan : 174 ekor (48,88 %) dan kelahiran : 90 ekor (32,61 %). - Penyediaan, distribusi dan stok semen beku dan N2 cair - Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi e. TPID Provinsi Bengkulu melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah melaksanakan pembagian benih tanaman bawang merah di Kabupaten Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong pada tanggal 24 September 2021 sebanyak 180 kg benih. (2) Keterjangkauan Harga a. TPID melalui BULOG melakukan kegiatan Ketersediaan Paokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras medium KPSH dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan pencapaian sbb : Juli 2021 sebanyak 253.621 kg, Agustus 2021 sebanyak 131.710 kg dan September 2021 sebanyak 87.800 kg. b. TPID melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan gelar pangan murah dalam rangka momen Idul Adha di tengah terbatasnya aktivitas masyarakat karena penerapan PPKM pada tanggal 12 s.d 16 Juli 2021. c. TPID melalui Disperindag Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan harga bahan pokok setiap hari serta pemantauan harga barang penting setiap hari Jumat (di 2 pasar pantauan statistik) (3) Kelancaran Distribusi a. Bersama BI melakukan digitalisasi pasar tradisional dengan perluasan penggunaan QRIS sebagai salah satu alternative pembayaran b. Menyampaikan Surat Permohonan prioritas penanganan jalan Enggano dari Gubernur Bengkulu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sesuai Surat No.620/1220/Bappeda/2021 dan No.620/1221/Bappeda/2021 tanggal 24 Agustus 2021. c. Menyampaikan Surat Permohonan kelanjuta pembangunan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau dari Gubernur Bengkulu kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI sesuai Surat No.620/1283/Bappeda/2021 tanggal 31 Agustus 2021. e. Dinas Ketahanan Pangan memfasilitasi Toko Tani Indonesia Center/Pasar Mitra Tani Provinsi Bengkulu untuk memasarkan produknya di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu setiap hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. (4) Komunikasi Efektif a. Melaksanakan Capacity Building TPID terkait Upaya Pengendalian Inflasi melalui Optimalisasi

Pemanfaatan Digital Farming pada tanggal 6 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Anggota TPID Provinsi/Kabupaten/Kota. b. Mengikuti kegiatan Rakornas TPID secara virtual pada tanggal 25 Agustus 2021 c. Melaksanakan kegiatan Bencoolen Regional Economic Forum (BRIEF) pada tanggal 23 September 2021 dengan topik "Mempercepat pemulihan mendorong sustainabilitas".

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi di daerah, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian TPID Provinsi Bengkulu pada Triwulan III 2021 diantaranya: 1. Badan Ketahanan Pangan telah meluncurkan aplikasi penjualan Toko Tani Indonesia Center / Pasar Mitra Tani secara online bernama PasTani pada bulan Juli 2021, namun TTIC/Pasar Mitra Tani Provinsi Bengkulu belum dapat menggunakan aplikasi tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: - PasTani merupakan aplikasi baru yang belum banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga perlu waktu untuk sosialisasi dan promosi kepada masyarakat umum. - Mekanisme pembayaran yang masih terbatas, sehingga sebagian konsumen mengeluh dalam hal pembayaran. - Belum ada dukungan dari Mitra Ojek Online Di Bengkulu - Untuk jarak pengantaran tidak diberi batasan, sehingga bila jarak jauh tidak ada respon dari pihak pengantar sehingga konsumen membatalkan pesanan. 2. Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pemerintah untuk mencegah penularan virus COVID-19 varian baru Delta berpotensi mengganggu kelancaran distribusi bahan pangan. Selain itu juga menyebabkan penurunan konsumsi bahan pangan dan mobilisasi masyarakat. 3. Terbatasnya pasokan bahan bangunan ditengah pelaksanaan PPKM serta mulai meningkatnya aktivitas sektor konstruksi dan progress pelaksanaan investasi swasta mendorong kenaikan harga sejumlah bahan bangunan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Berkaitan dengan peningkatan harga yang terjadi serta adanya pandemi COVID-19, TPID Provinsi Bengkulu akan memaksimalkan potensi pasokan dan produksi komoditas bahan makanan kedepan. Akan didorong pembukaan lahan sawah baru serta optimalisasi kegiatan budidaya komoditas pertanian. 2. Perlu dilakukan usulan penyesuaian kuota bahan bakar rumah tangga sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg di Provinsi Bengkulu. 3. Penjajakan BUMD/BUMDES/Gapoktan potensial sebagai pelaksana KAD antara Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan. 1. Sebagai tindak lanjut kegiatan capacity Building digital farming, TPID Kabupaten/Kota dapat mengusulkan pengembangan budidaya pertanian melalui pemanfaatan digital farming sebagai salah satu alternative dalam mendukung ketersediaan pasokan dan pengendalian harga komoditas pangan di daerah.